



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ZINA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA  
(Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau  
Menurut Hukum Islam)”**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)



**Oleh:**

**KAMALUDDIN TAMUSAI NST**  
**NIM: 11421100755**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan Judul **ZINA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PASAL 284 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM )** yang ditulis oleh :

NAMA : Kamaluddin Tamusai NST

NIM : 11421100755

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021  
Pembimbing Skripsi,

Dr. Wahidin, M.Ag



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ZINA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PASAL 284 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)"** yang ditulis oleh :

Nama : Kamaluddin tamusai Nst  
 NIM : 11421100755  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at 06 Agustus 2021  
 Waktu : 07.00 WIB  
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir ,Lc.,MA**

Sekretaris

**Yuni Harlina, M.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)”** ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan ketentuan zina dalam KUHP pasal 284 dengan ketentuan zina dalam hukum Islam. KUHP menyebutkan bahwa perbuatan itu dikatakan zina apabila dilakukan oleh orang yang berstatus sudah menikah baik keduanya atau salah satunya, sedangkan dalam hukum Islam ketentuan zina tidak demikian. Zina adalah perbuatan hubungan seksual diluar pernikahan baik pelakunya sudah berstatus menikah ataupun belum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana zina menurut KUHP Pasal 284? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zina dalam KUHP Pasal 284?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data primer yang berasal dari KUHP dan buku atau literatur lain yang berkenaan dengan pembahasan pada masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Sedangkan teknis analisis data menggunakan *content analysis*. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian hingga mendapat kesimpulan.

Perbuatan zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Adapun tinjauan hukum Islam atas pasal 284 KUHP yaitu Dari segi definisi zina, sangat tampak perbedaan yang bertentangan antara KUHP dan hukum Islam. KUHP membatasi atau memberi syarat tentang definisi zina yang mana pembatasan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam yang diharamkan bukan hanya mendekati zina saja akan tetapi segala hal yang mendorong untuk melakukannya, dan segala penyebab yang dapat membuat orang melakukannya. Maka dapat kita lihat bahwa dalam pasal 284 terkesan melonggarkan dan memberi peluang besar untuk orang berbuat zina. Dalam KUHP status suami istri menjadi syarat agar perbuatan tersebut masuk kategori zina. Sedangkan dalam hukum Islam perbuatan zina tidak terbatas oleh status suami istri, intinya perbuatan tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam status suami istri menjadi pembeda dalam pemberian hukuman zina, bukan sebagai syarat perbuatan zina sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 284 KUHP.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Rab semestaalam, zat yang menurunkan Al-Qur'an kalamnya yang begitu indah dan membawa kemaslahatan bagi hambanya. Saat Al-Qur'an dibaca, maka menggetarkan hati dan menambah keimanan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Ahwal AlSyakhsyiyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Bukanlah yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa'at di hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan, dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam ta'zim kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Keluarga besar penulis di penghidupan: Ayahanda tersayang Sangkot Nasution dan Ibunda tercinta Rasidah Hasibuan yang telah memberikan pengorbanan dan dorongan yang tidak ada terhingga kepada penulis dalam menggarungi perjalanan hidup baik dorongan moril maupun materiil. Juga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Istri tercinta Surya Rezky yang telah menemani hidup dalam suka maupun duka serta selalu memberikan bantuan dan dorongan moril, materil, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. H.Erman, M.Ag, wakil dekan I, dan Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si wakil dekan II, Dr.Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
5. Bapak Dr. Wahidin., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai
6. Teman-teman penulis yang senasib dan sepernanggungan:, Akhi Muhammad Yusuf Sabili, S.H, Muhammad Badri, S.H, Satri Mulyadi, S.H, Al-Yusri,S.H, Surya Arifin,S.H, Ahmad Fauzi yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka sebagai sumber kebijakan Emosional bagi penulis dalam menghadapi berbagai problem dan dinamika persoalan ketika menyusun skripsi ini, dan teman-teman reguler Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kalian semua teman-teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan bercanda
7. Pihak perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum perpustakaan utama UIN Sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan dan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan membalas dengan balasan yang setimpal. Sebagai karia ilmiah penulis tidak menutup mata terhadap kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistimatika penulis, serta penulis sangat mengharapkan kritikan konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021  
Penulis,

**KAMALUDDIN NST**  
**NIM. 11421100755**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II SEJARAH KUHP .....</b>	<b>12</b>
A. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia...	12
B. Problematika Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht) .....	17
C. Pembaharuan KUHP .....	22
<b>BAB III TEORI TENTANG PERZINAAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam .....	26
B. Dalil Keharaman Zina. ....	32
C. Kriteria Perzinahan Menurut Islam. ....	33
D. Kriteria perzinahan menurut KUHP .....	38
E. Dampak Perbuatan Zina .....	40
F. Kriteria perzinahan menurut KUHP .....	44
G. Kriteria Tindak Pidana Perzinaan .....	45
H. Jenis Zina dan Hukuman tindak pidana perzinaan.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Zina menurut KUHP Pasal 284 .....	52
B. Tinjauan hukum Islam terhadap zina dalam KUHP Pasal 284 .....	57



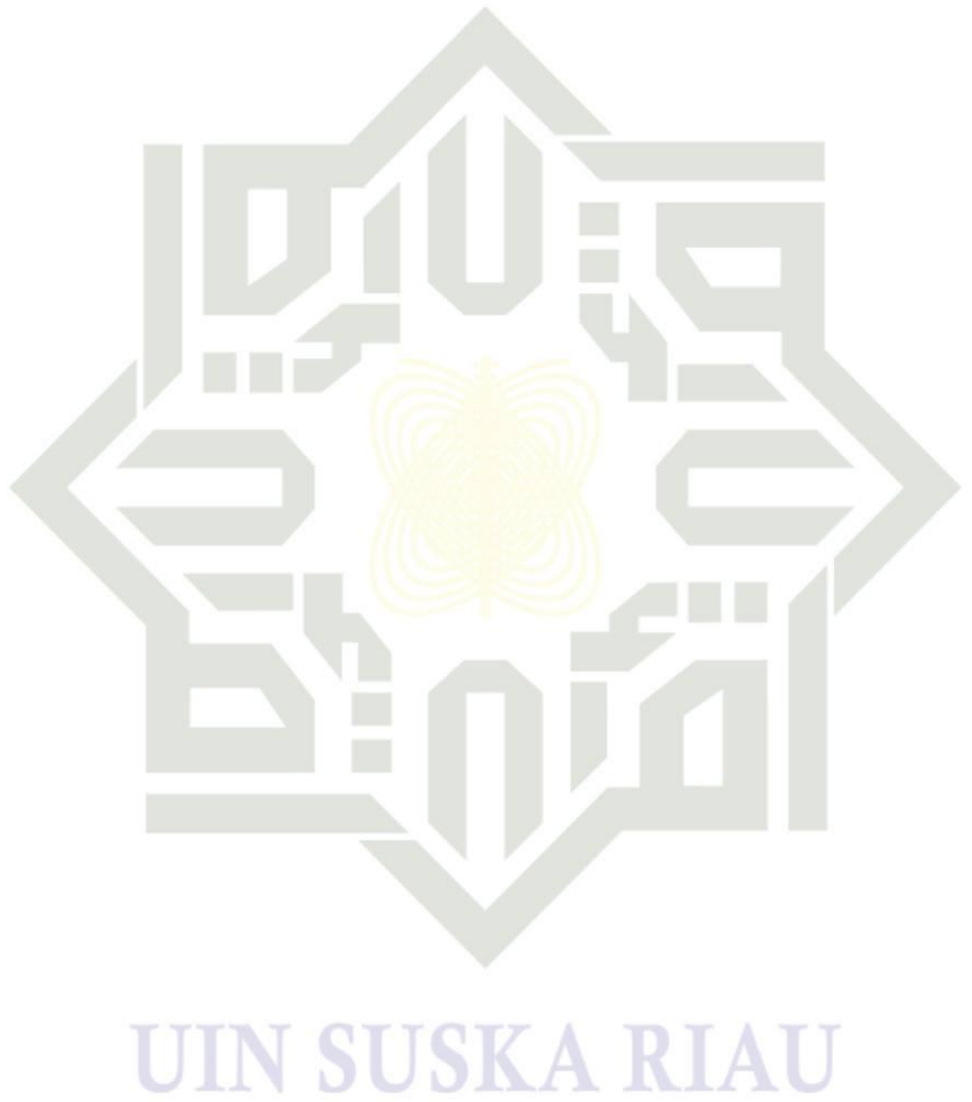


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Ketentuan perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus perzinahan yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat sudah banyak terjadi, bisa dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tercermin rasa tidak bersalah.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah karena ia merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami-istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung.<sup>2</sup> Pernikahan juga salah satu cara jalan menutup terjadinya perzinaan.

Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya pantas dikenakan sanksi yang paling keras.<sup>3</sup> Islam sangat membenci zina dan memerintahkan agar menjauhkan diri dari semua yang mendorong seseorang untuk melakukan

<sup>1</sup> Neng Zubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 1

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1973), Jil. 2, h. 340

<sup>3</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina, karena perbuatan ini memiliki banyak dampak yang merusak kehidupan.<sup>4</sup> Akibat dari perzinahan diantaranya dapat mengaburkan dan merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan perhubungan, menyebabkan penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan rusaknya moral.<sup>5</sup>

Dalam KBBI, zina diartikan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>6</sup>

Secara bahasa zina berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna persetubuhan diluar pernikahan.<sup>7</sup> Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa.

Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Iman Hidayat, *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 16 No.1 Tahun 2016, h. 45

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Tim Penerbit Jabal, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), Cet. Ke-2, h. 141

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada hari Sabtu 09 Januari 2021, pukul 15.30 WIB.

<sup>7</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press. 2008), h. 47

<sup>8</sup> Sahran Hadziq, *Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji Dalam Perspektif Living Law*, Jurnal Lex Renaissance Vol. 4 Januari 2014, h. 26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeikh Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi zina:

الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد: وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته<sup>9</sup>

Artinya: *Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.*

Zainuddin al-Malibari mengatakan bahwa hubungan badan dapat dikatakan zina apabila dilakukan dengan cara sebagai berikut:

ايلاج حشفة او قدرها من فاقدھا في فرج ادمي حي قبل او دبر ذكر او انثى مع علم تحريمه<sup>10</sup>

Artinya: *Memasukkan hasyafah (kepala zakar) atau seukurannya bagi orang yang tidak mempunyai hasyafah pada kemaluannya, ke dalam kemaluan seorang manusia hidup, kubul ataupun dubur laki-laki ataupun wanita, dan si pelakunya mengetahui hal tersebut di haramkan.*

Abdul Qodir Audah mengemukakan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama fiqh tentang pengertian zina sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan syubhat.
- 2) Mazhab Maliki mendefinikan zina sebagai hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), Cet. 2, jil. 6, h. 26

<sup>10</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, (Surabaya: Dar Al-Abidin, t.th), h. 128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar kedalam kemaluan wanita yang haram baginya tanpa adanya unsur *syubhat* dan disertai adanya nafsu (syahwat).
- 4) Mazhab Hanbali mendefinisikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus.
- 5) Zaidiyah mendefinisikan zina adalah bertemunya kemaluan seseorang dengan kemaluan orang lain yang masih hidup dan diharamkan, baik melalui vagina maupun anus dengan tanpa adanya unsur *subhat*.<sup>11</sup>

Menurut *Ensiklopedi hukum islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”<sup>12</sup> Sedangkan menurut M.Quraish Shihab, pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>13</sup>

Adapun dalil tentang larangan perbuatan zina terdapat dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

<sup>11</sup> Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-1, h. 114

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, Jil. 6, h. 2026

<sup>13</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. Ke-9, Jil. 9, h.279

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Qurthubi mengatakan, “Para ulama mengatakan bahwa firman Allah yang artinya ‘janganlah kamu mendekati zina’ dalam ayat ini maknanya lebih dalam, yaitu ‘janganlah melakukan zina’. Makna ayat tersebut adalah jangan mendekati zina.<sup>14</sup> Sedangkan imam Ath-Thabari mengatakan makna dari pada ‘jalan yang buruk’ yaitu jalan zina merupakan jalan yang buruk karena merupakan jalan ahli maksiat kepada Allah SWT, orang-orang yang menantang perintahnya. Dan jalan ini akan mengantarkan pelakunya kedalam neraka jahannam.<sup>15</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, aturan tentang perzinaan dimuat dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

#### Pasal 284

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- Ke-1.
  - a. Laki-laki yang beristri berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
  - b. Perempuan yang bersuami yang berzina.
- Ke-2.
  - a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami.
  - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.<sup>16</sup>

Secara umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Dalam penjelasan pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>14</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Rijal Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, Jil. 10, h. 627

<sup>15</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Ahsan Aksan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jil. 16, h. 656

<sup>16</sup> R. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981, h. 299



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pidana (KUHP) Indonesia dinyatakan bahwa “*zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun*”.<sup>17</sup>

Pengertian ini hanya membatasi pada pelaku zina yang telah kawin, sementara pelaku yang belum pernah kawin tidak dikategorikan zina, tetapi hanya dikategorikan “perbutan cabul” Tampaknya, pengertian “telah kawin” dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan atau pula berada dalam ikatan pernikahan dan bukan berstatus janda ataupun duda.

Dengan demikian, dapat pula disimpulkan bahwa istilah zina dalam pasal 284 KUHP adalah<sup>18</sup>:

- 1) Dapat dikenakan pada orang yang telah melakukan akad nikah dan masih berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangan sahnya pada saat melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sahnya yang dikategorikan zina tersebut.
- 2) Tidak dapat dikenakan pada orang yang pernah melakukan akad nikah, tetapi pada saat terjadinya hubungan seksual yang dikategorikan zina itu, ia tidak berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangan sahnya, atau berada dalam posisi janda atau duda.
- 3) Tidak dapat dikenakan pada orang yang belum pernah menikah (jejaka atau perawan).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 300

<sup>18</sup> Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Op.cit*, h. 115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka menurut pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>20</sup>

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan, tampak jelas perbedaan pengertian zina dalam KUHP dan pengertian zina dalam fikih. Menurut KUHP, zina hanya dapat dikenakan hanya pada orang yang dalam ikatan pernikahan saja.<sup>21</sup> Maka makna zina disini terlalu sempit sehingga membuka peluang terjadinya perbuatan zina. Sedangkan dalam fikih, zina itu tidak terbatas hanya pada orang yang dalam ikatan pernikahan.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Dan untuk menguraikannya secara rinci maka penulis kemas hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul **“Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)”**.

#### Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup zina menurut KUHP perspektif hukum Islam.

#### Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas, maka penulis membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Neng Zubaidah , *op.cit*, 65

<sup>21</sup> Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Op.cit*, h. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Zina menurut KUHP Pasal 284?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zina dalam KUHP Pasal 284?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengertian zina dalam KUHP Pasal 284.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap zina dalam KUHP Pasal 284.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah perzinahan.

**3. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>22</sup>

#### 5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu bahan yang diambil dari KUHP
- b. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, yaitu buku-buku penjelasan KUHP, buku-buku yang membahas tentang perzinahan, dan diambil dari kitab-kitab fiqh seperti *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, dan kitab lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dll.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

#### 7. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*.

Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1. h. 184.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian.<sup>23</sup>

### 8. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

### E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II :** Dalam bab ini akan diuraikan tentang profil KUHP.

**BAB III :** Merupakan tinjauan umum tentang zina, yaitu dimulai dari definisi zina, dasar hukum zina, hukuman pelaku zina dalam KUHP dan dalam fikih.

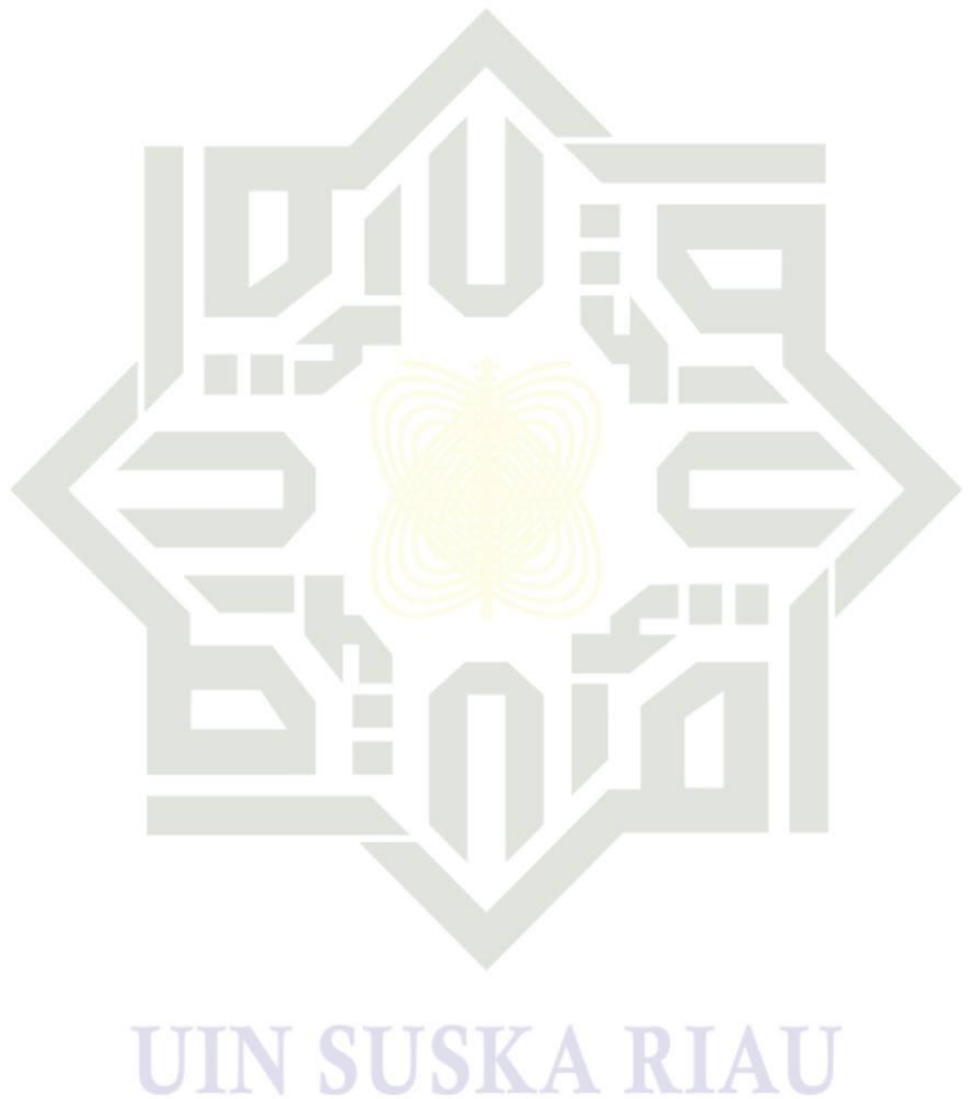
<sup>23</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), c. ke-9, h.167

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang zina dalam KUHP pasal 284 dan tinjauan hukum islam terhadap zina dalam KUHP pasal 284

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### SEJARAH KUHP

#### A Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI).<sup>24</sup> KUHP diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886.<sup>25</sup> Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada

<sup>24</sup> Hari Sasangka, Ahmad Rifa'i, *KUHP Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), Cet. Ke-1, h. 2

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), h. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886.<sup>26</sup>

Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (*Code Penal*) selama kurang lebih 68 tahun (sampai tahun 1881). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, *Code Penal* mengalami beberapa perubahan, terutama pada ancaman pidananya. Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam *Code Penal* diiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada tahun 1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon dan mulai diberlakukan lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886.<sup>27</sup>

Sebelum negara Belanda mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon pada tahun 1886, di wilayah Hindia- Belanda sendiri ternyata pernah diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan Staatblad Tahun 1866 Nomor 55 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867. Bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan Staatblad Tahun 1872 Nomor 85.<sup>28</sup>

Dualistis sistem yang terjadi mempunyai pengertian bahwa bagi orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda, yakni titah raja atau *Koninklijk*

<sup>26</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982), h. 42

<sup>27</sup> Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006, h. 13

<sup>28</sup> Kanter dan Sianturi, *op.cit*, h. 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Besluit* (K.B), dan bagi orang bumi putra berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa tersebut merupakan aturan yang berasaskan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Kemudian hukum yang berlaku bagi orang bumi putra sendiri merupakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis.<sup>29</sup>

Pada 10 Februari tahun 1866 merupakan awal pengenalan kodifikasi kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggunakan *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen*, berlaku mulai 1 januari 1867. Kemudian dari peraturan pemerintah (ordonansi) pada 6 Mei 1872 ditetapkan pula *Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde*. Ordonansi tersebut merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagi orang bumi putra, dan mulai berlaku pada 1 januari 1873.

*Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup bumi putra. Ada perbedaan mengenai kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi. Jika orang bumi putra melakukan perbuatan pidana sanksinya adalah kerja paksa (rodi), sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan.<sup>30</sup>

Dualistik sistem yang terjadi akhirnya berakhir setelah ditetapkannya *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh* sebagai hukum pidana di Hindia Belanda, dan berlaku pada 1 Januari 1918. *Koninklijk Besluit Van*

<sup>29</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 60

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 61-62



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Srtafrech Voor Nederlandsh* merupakan aturan pidana khusus bagi daerah jajahan yang dibentuk pada tahun 1913. Pada mulanya dualistik hukum akan tetap dipertahankan, yakni dengan membuat aturan bagi orang Belanda dan bumi putra. Ketika kedua aturan tersebut telah diselesaikan, ternyata menteri daerah jajahan ketika itu (Mr. Indenburg) berpendapat lain, bahwa harus ada satu saja hukum pidana di Hindia Belanda.

Namun dari hasil kodifikasi tersebut tidak sama dengan apa yang berlaku di negara asalnya, karena terdapat penyesuaian menurut kebutuhan dan keadaan tertentu. Terdapat pasal-pasal yang dihapus guna menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme. Akan tetapi azas-azas dan dasar filsafatnya tetap sama, yakni dari masa liberal kapitalis.<sup>31</sup>

Kodifikasi yang dilakukan Belanda ternyata sepenuhnya tidak didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, seperti Van Vollenhoven. Ia berpendapat bahwa jika kodifikasi secara sepihak dilakukan maka tatanan masyarakat adat akan hancur. Karena tidak benar pemberian hukum Belanda kepada orang bumi putra akan memperkaya peradaban pribumi. Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Selama ini masyarakat adat telah terbiasa hidup dengan hukum apa adanya, baik tertulis ataupun tidak tertulis.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Sudarto, *Loc.cit*

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, dinamika sosial politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), h. 126-127

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan gambaran sejarah demikian, runtutan sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dapat dilustrasikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

Tahun	Peristiwa	Selisih Waktu
1810	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Perancis	1 tahun
1811	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Belanda	56 tahun
1867	<i>Wetboek van Strafrecht voor Europeanen</i> berlaku di Hindia-Belanda	6 tahun
1873	<i>Wetboek van Strafrecht voor Inlander</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	8 tahun
1881	<i>Wetboek van Strafrecht</i> disahkan di Belanda	5 tahun
1886	<i>Wetboek van Strafrecht</i> diberlakukan di Belanda	29 tahun
1915	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disahkan untuk Hindia-Belanda	3 tahun
1918	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	28 tahun
1946	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disebut sebagai KUHP Indonesia	

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.

Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik

<sup>33</sup> Ahmad Bahiej, *Op.cit*, h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>34</sup>

### B. Problematika Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht)

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri.

Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Problematika tersebut antara lain sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan sejak 59 tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP)

<sup>34</sup> <https://himaihuinsuka.files.wordpress.com/2011/11/02-sejarah-sistematika-kuhp-dan-pembaharuan-hukum-pidana-de280a6.pdf>, diakses pada 14 April 2021 Pukul 20.00 WIB.

<sup>35</sup> Ahmad Bahiej, *Op.cit*, h. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan.

2. *Wetboek van Strafrecht* atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 87 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari 124 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP tersebut. KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.
3. Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana, seperti terjemahan Mulyatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi yang berbeda-beda.
4. KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano-Germanic Family*. *The Romano Germanic family* ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*). Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

5. Jika KUHP dilihat dari tiga sisi masalah dasar<sup>28</sup> dalam hukum pidana, yaitu pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, maka masalah-masalah dalam KUHP antara lain:<sup>36</sup>

a. Pidana

KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim atau penegak hukum yang lain, sehingga arah pemidanaan tidak tertuju kepada tujuan dan pola yang sama. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku.

Sistem pemidanaan dalam KUHP juga lebih kaku sehingga tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Tindak Pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positif dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan.

Di samping itu, KUHP menganut pada *Daadstrafrecht* yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan. Aliran ini pada sekarang sudah banyak ditinggalkan, karena hanya melihat dari aspek perbuatan (*Daad*) dan menafikan aspek pembuat (*Dader*). KUHP masih menganut pada pembedaan kejahatan dan pelanggaran yang sekarang telah ditinggalkan.

Tindak pidana tindak pidana yang muncul di era modern ini, seperti *money laundering*, *cyber criminal*, lingkungan hidup, dan beberapa perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai tindak pidana belum tercover di dalam KUHP. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>37</sup>

#### c. Pertanggungjawaban pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana ini antara lain mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penjelasan WvS.34 Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas).

Masalah lainnya adalah masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak. Anak di dalam KUHP (Pasal 45-47) adalah mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara rinci tentang aturan pidanaaan bagi anak. Pasal 45 hanya menyebutkan beberapa alternatif yang dapat diambil oleh hakim jika terdakwa adalah anak di bawah umur 16 tahun. Selain itu, KUHP tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada dataran realitas, sering kali beberapa tindak pidana terkait dengan korporasi seperti pencemaran lingkungan.<sup>38</sup>

Sekarang KUHP Belanda, mengalami perubahan-perubahan, karena kemajuan teknologi, KUHP Indonesia hanya perlu ditambah, tetapi tidak pernah dirivisi, sehingga sangat ketinggalan zaman. Pemakaian KUHP sekarang diperlukan Interpretasi sosiologis, agar dapat disesuaikan dengan kehidupan riel bangsa Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia, masih mempergunakan KUHP yang sudah ketinggalan, tetapi sebenarnya, hanya terdapat delik-delik yang nrrtal, yang dikenal di seluruh dunia. Misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, pemerkosaan,

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemalsuan surat, sehingga KUHP yang ketinggalan zaman masih dapat diterapkan. Sedangkan delik yang tidak netral, artinya setiap negara berbeda, seperti delik kesusilaan, delik agama, dan delik ideologi. Untuk delik-delik tersebut, diperlukan keanekaragaman rakyat Indonesia. Termasuk delik komputer, cyber, penyadapan, perekaman, delik lingkungan hidup, pencucian uang, delik tersebut mesti ditambah dalam KUHP.<sup>39</sup>

KUHP terbagi dalam tiga buku. Buku pertama tentang ketentuan umum. Buku kedua tentang kejahatan penting. Buku ketiga tentang pelanggaran. Sebagai karya besar dan sampai sekarang setelah seratus tahun berlalu. Belum ketinggalan zaman. Bahkan KUHP tersebut masih diberlakukan di Suriname, kepulauan Antillen dan Aruba. Serta Indonesia, tanpa memunculkan persoalan besar. Setidak tidaknya demikian. KUHP ini diilhami oleh jiwa periode klasik, sebagai penerus dan pengganti *code penal*, Wvs banyak mengambil dan meminjam darinya, satu hal yang tidak terhindarkan mengingat kepentingan hukum, untuk menjaga kontinuitas perkembangan yurisprudensi, disamping itu, pengaruh dari *code penal* Belgia dan KUHP Jerman tahun 1987.<sup>40</sup>

#### Pembaharuan KUHP

Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Mencakup penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi, politik penegakan hukum

<sup>39</sup> Syaiful Bakri, *Sejarah Pembaharuan KUHP&KUHP*, (Yogyakarta: Total Media, 2011),

Ke-1, h. 30

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian politik social (*social policy*), yang merupakan usaha setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>41</sup>

Dalam konsep KUHP baru, terdapat perubahan-perubahan dan merupakan hal yang baru dibandingkan dengan KUHP lama yang berlaku sekarang ini. Hal-hal baru atau aspek-aspek baru yang terdapat dalam konsep KUHP baru, meliputi sistematika KUHP baru tidak lagi terdiri atas tiga buku. Melainkan hanya dua buku. Buku pertama tentang ketentuan umum dan buku ke dua memuat tentang tindak pidana, yang tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Konsep KUHP, berdasarkan pada adanya asas keseimbangan, antara asas legalitas dan asas kesalahan, serta sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum materil.<sup>42</sup>

Pada bagian lain, tentang pembaruan hukum pidana, perlu diketahui, sejak awal berlakunya KUHP 1918, atau dikenal juga sebagai WvSI, telah terdapat perbedaan antara KUHP yang diperlakukan sekarang, dengan KUHP Belanda. Perbedaan itu meliputi;

1. Perbedaan rumusan delik. Pada pasal dua Wvs dan WvSI. Mencantumkan undang-undang pidana ini, berlaku di wilayah Nederland, sedangkan KUHP. Ketentuan perundang-undangan pidana berlaku di daerah Nederland Indie. Ini logis karena belanda tidak dapat membuat wet atau undang-undang tetapi hanya *ordonentie* dan *verorodening*.
2. Jenis pidana dalam Wvs dicantumkan dalam pasal 9, dengan menghapuskan hukuman mati, sejak tahun 1870. Tetapi menurut pasal 10

<sup>41</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, h. 81

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHP. Hukuman mati masih dicantumkan, karena keadaan di Indonesia, masih perlu untuk di perlakukan. Termasuk pidana kerja di tempat Negara, juga tidak di kenal dalam KUHP.

3. Beberapa delik lebih berat. Dalam Wvs. Delik pencurian di atur dalam pasal 310, di ancam pidana penjara 4 tahun, sedangkan dalam KUHP 5 tahun. Delik penipuan dan penggelapan dalam pasal 326 dan 321, maksimum 3 tahun penjara, sedangkan KUHP maksimum 4 tahun. Delik penadahan pasal 416 wvs maksimum 3 tahun, dalam KUHP maksimum tahun. Dalam hukum acara pidana Belanda delik yang dapat di tahan adalah ancaman 5 tahun, dan di sebutkan satu persatu deliknya sedangkan di Indonesia, ancaman hukuman 4 tahun dapat di tahan dengan menentukan delik-delik tertentu.
4. Ketentuan tentang pidana bersyarat sebagaimana di tentukan dalam pasal 14 a sampai dengan f. baru di ciptakan dalam KUHP 1926. No 251, di masukkan dalam KUHP dan berlaku sejak 1 januari 1927 (Stb 1926 no. 486).
5. Perbedaan pelaksanaan pidana. Pada pasal 20 Wvs. Pidana kurungan dapat memilih untuk bekerja atau tidak. Sedangkan menurut pasal 19 KUHP merupakan suatu kewajiban untuk bekerja. Narapidana di Belanda bekerja di luar tembok penjara sedangkan di Indonesia masih berada di dalam tahanan.
6. Tentang denda minimum ditentukan, dalam Wvs, 0,50 Gulden, di Indonesia, sekarang minimum dua ratus lima puluh ribu rupiah.
7. Ketentuan pasal 44 KUHP, berbeda dengan Wvs, tentang *Psychopaten*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Perbedaan tentang peradilan anak.
9. Perbedaan rumusan tentang ketentuan pembelaan terpaksa (*noodwee*).
10. Perbedaan rumusan delik pada buku kedua, tentang sengaja melanggar kesusilaan, delik pemerasan dalam jabatan.
11. Rumusan jenis pencurian, yang tidak ada padanya menurut kedua KUHP, yakni penyamun, pencurian rumput, daun kering, tanah, pasir dan sebagainya, yang tidak relevan di atur di Indonesi.<sup>43</sup>

Subtansi RUU KUHP yang di dalamnya mengandung sistem hukum pidana materiil, beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, di susun dan di formulasikan, dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan idea dasar keseimbangan, yang antara lain mencakup:

1. Keseimbangan antara moralitas yang berkaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan.
2. Keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana.
3. Keseimbangan antar unsur, faktor objektif, dan subjektif.
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil.
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelunturan elastisitas atau pleksibilitas dan keadilan.
6. Keseimbangan antara kearifan lokal/kearifan fartikularistik, nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), H. 10-15

<sup>44</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, h. 98



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TEORI TENTANG PERZINAHAN

##### A. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Zina secara harfiah berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>45</sup> Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).<sup>46</sup>

Kata zina ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.<sup>47</sup> Zina merupakan bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).<sup>48</sup>

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak

<sup>45</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 31.

<sup>46</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prapanca, 1962), h. 117.

<sup>47</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1, h. 35-36.

<sup>48</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarluaskan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan disusun kemukakan empat defenisi menurut mazhab yang empat.

#### 1. Pendapat Hanafiah

Mazhab al-Hanafiyah menyebutkan bahwa defenisi zina adalah :

وطء الرجال المرأة في القبل بغير ملك ولا شبهة

Artinya: *Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.*

Defenisi ini menegaskan kriteria zina itu :

1. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walau pun tetap berdosa.
2. Pada kemaluan atau faraj, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina.
3. Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.
4. Dan juga bukan *syubhat*.<sup>49</sup>

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam

<sup>49</sup> Ahmad Sarwat, , *Seri Fiqih Kehidupan jinayat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 151

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.<sup>50</sup> Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

## 2. Pendapat Malikiyah

Khalil bin Ishaq bin Musa (w. 76 h) salah satu ulama dari kalangan mazhab al-malikiyah di dalam kitabnya *mukhtasar al-khalil* menuliskan pengertian zina sebagai berikut :

وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه با اتفاق تعمدا

Artinya: *Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja*<sup>51</sup>

- a) Hubungan Seksual: kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan.
- b) Yang dilakukan oleh seorang Mukallaf : maksudnya adalah orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, bukan termasuk zina
- c) Yang Muslim : sehingga bila pelakunya bukan muslim, tidak termasuk yang dikenakan hukuman *hudud*, yaitu rajam atau cambuk.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6

<sup>51</sup> Ahmad Sarwat, *Op.cit*, h. 153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pada Faraj manusia : sehingga bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram namun bukan termasuk zina.
- e) Adami : maksudnya faraj itu milik seorang manusia dan bukan faraj hewan. Hubungan seksual manusia dan hewan meski hukumnya terlarang, tetapi dalam konteks ini bukan termasuk zina.
- f) Yang bukan budak miliknya.
- g) Tanpa ada syubhat.
- h) Dilakukan dengan sengaja.<sup>52</sup>

Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>53</sup> Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.

### 3. Pendapat Syafi'iyah

Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Ajili (w. 1204 h) di dalam kitabnya *Hasyiatul Jumal 'ala Syahril minhaj* menuliskan definisi tentang istilah zina sebagai :

ايلاج حشفة او قدرها في فرج محرم لعينه مشتتهى طبعاً بلا شبهة

<sup>52</sup> Ibid. h. 154

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.cit*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.*

- Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya.
- Ke dalam kemaluan wanita.
- Yang haram.
- Dalam keadaan syahwat alami.
- Tanpa syubhat.<sup>54</sup>

Asy-Syairaji (w. 476 h) dari mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitab *Al-Muhadzdzab* menuliskan tentang zina sebagai berikut :

وطء رجل من اهل دار الاسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك وهو عاقل مختار عالم بالتحريم

Artinya: *Hubungan seksual yang di lakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah, atau syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bias memilih dan tahu keharamannya.*

- Hubungan seksual.
- Yang dilakukan oleh seorang laki-laki.
- Dari penduduk darul-islam.
- Kepada seorang perempuan.
- Yang haram baginya.
- Yaitu tanpa akad nikah.
- Atau syibhu akad.
- Atau budak wanita yang di miliki.

<sup>54</sup> Ahmad Sarwat, *Op.cit*, h. 154

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Dalam keadaan berakal.
- j) Bisa memilih.
- k) Dan tahu keharamannya.<sup>55</sup>

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>56</sup> Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

#### 4. Pendapat Hanabilah

Ibnu Muflih (w. 84 h) di dalam kitab *Al-Mubdi' fi Syarhil Muqni'* menuliskan tentang zina yang terkena hukum hudud :

ولا يجب الحد الا بشرة ثلاثة احداها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا او دبرا وأقل ذلك تغيب الحشفة في الفرج فان وطئ دون الفرج أو أتت المرأة فلا حد عليهما

Artinya: *Tidaklah wajib dihukum hudud kecuali dengan tiga syarat. Pertama, menyetubuhi pada faraj baik depan atau belakang. Minimal dengan lenyapnya hasyafah penis laki-laki yang kedalam vagina. Bila bukan kedalam vagina atau wanita dengan wanita maka tidak ada hukuman hudud.*<sup>57</sup>

Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat penyusun simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah

<sup>55</sup> Ibid, h. 155

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 7

<sup>57</sup> Ahmad Sarwat, *Op.cit*, h. 155

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

**Dalil Keharaman Zina.**

1. Al-Qur'an

Perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang larangannya ditetapkan dalam firman Allah SWT. dalam surah al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>58</sup>

Larangan zina menurut ayat diatas merupakan larangan yang utama dalam konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhawat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencang dengan pasangan selingkuhannya.

Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara

<sup>58</sup> Ibid, h. 286



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.<sup>59</sup>

Ketika menyebutkan ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman, Allah menyebutkan beberapa kriteria. Salah satunya adalah mereka yang tidak berzina.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>٦٨</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَتَحْدُّ فِيهِ<sup>٦٩</sup> مُهَانًا

Artinya: Dan tidak berzina, siapa yang melakukan dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). Azabnya di lipat gandakan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. (QS. Al-Furqan :68-69)

#### 2. As-Sunnah

#### Kriteria Perzinahan Menurut Islam.

Adanya persetubuhan (sexual Intercourse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman

<sup>59</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), Cet. 1, h. 149-150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.<sup>60</sup> Oleh karena itu, hikmah disyariatkannya hukuman ta'zir bersifat edukatif sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had yakni hukuman merupakan penghapus dosa.

Tidak semua orang yang berzina dihukum rajam atau cambuk. Hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu saja yang dijatuhi hukuman itu. Bila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban menjalankan hukuman atas pelaku zina.

#### 1. Sudah Baligh

Hanya elaku zina yang sudah cukup usia (baligh) saja yang dihukum. Apabila zina itu dilakukan oleh anak laki-laki yang baligh, karena belum keluar mani, maka tidak dijatuhi hukuman hudud.

Demikian pula bila seorang wanita yang belum haidh melakukan tindakan zina, maka tidak wajib dijatuhi hukum hudud atasnya.

#### 2. Berakal

Hanya pelaku zina yang berakal waras saja yang dijatuhi hukum hudud. Sedangkan orang yang kurang waras akalnya, tidak dijatuhi hukum hudud. Seorang wanita yang gilabila diajak berzina oleh orang waras, maka yang dihukum hudud hanyalah yang waras saja, sedangkan yang gila tidak dihukum hudud. Demikian juga sebaliknya.

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendeknya hukum hudud tidak berlaku buat orang yang kurang akal nya, atau tidak sama sekali berakal. Tetapi orang yang waras sengaja minum khamar agar mabuk, bila saat mabuk itu dia berzina, tidak dianggap kurang waras, meski kenyataan nya demikian. Dia dianggap sebagai orang yang sehat akal nya. Sehingga orang yang sehat mabuk lalu berzina, maka dia tetap dijatuhi hukum hudud.

3. Muslim

Hanya pelaku zina yang beragama islam saja yang dijatuhi hukum hudud. Karena keislaman pelaku zina disyaratkan dalam masalah hukum ini.

Adapun bila seorang laki-laki non-muslim berzina dengan wanita muslimah, maka yang laki-laki tidak dihukum hudud, sedang yang muslimah di hukum hudud. Laki-laki non-muslim itu tidak dihukum hudud namun hanya di hukum ta'zir.

Sedangkan keduanya bukan muslim, maka keduanya tidak dihukum hudud, tetapi dihukum ta'zir sesuai dengan pandangan hakim sebagai pelajaran bagi keduanya.

Namun jumhur ulama mengatakan bahwa seorang kafir yang berzina dihukum hudud.

4. Tidak Terpaksa

Perbuatan zina yang wajib di jatuhi hukum hudud hanyalah bila zina itu dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Seorang yang dipaksa berzina dengan ancaman yang membahayakan, seperti diperkosa atau mengalami kekerasan seksual, maka tidak dijatuhi hukum hudud.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dengan Manusia

Hanya perbuatan zina yang dilakukan oleh manusia dengan manusia saja yang dijatuhi hukum hudud. Sedangkan bila zina itu dilakukan seorang manusia dengan hewan, maka pelakunya dihukum dengan ta'zir bukan dengan hudud.

Sedangkan hukum hewan yang disetubuhi itu tetap halal dan dagingnya boleh dimakan. Namun Al-Hanabilah menyatakan bahwa bila perbuatan itu disaksikan oleh minimal 2 orang, maka hewan itu dibunuh, pelakunya diwajibkan membayar harga hewan itu tapi dagingnya tidak halal dimakan.

6. Mampu Melakukan Hubungan Seksual

Orang yang secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual, misalnya anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, pada hakikatnya tidak bias melakukan zina.

Bila laki-laki bersetubuh dengan wanita di bawah umur, tidak dihukum hudud. Begitu juga bila seorang wanita dewasa bersetubuh dengan anak kecil yang belum baligh.

7. Tidak Syubhat

Zina yang mewajibkan hukum hudud adalah zina yang dilakukan dengan jelas, bukan kesalahan yang tidak disengaja atau mengandung syubhat. Seperti bila seorang menyangka wanita yang disetubuhinya adalah istrinya tapi ternyata bukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mungkin hal itu jarang terjadi, tetapi di mungkinkan terjadinya, karena itulah para ulama menegaskan bahwa orang yang mengira seorang wanita sebagai istrinya, lalu melakukan hubungan seksual, kemudian akhirnya ketahuan bahwa ternyata wanita itu bukan istrinya, maka hal itu tidak termasuk zina yang mewajibkan hukum hudud.

Namun imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan tetap harus dihukum hudud.

8. Tahu Ancaman hukum

Pelakunya adalah orang yang mengerti dan tahu bahwa ancaman hukuman zina adalah hudud yaitu rajam atau cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.

Sehingga bila pelakunya mengaku bahwa dia tidak tahu ancaman hukuman zina, maka para ulama berbeda pendapat.

9. Pasangannya Bukan Kafir Harbi

Seorang yang berzina dengan wanita yang statusnya kafir harbi, tidak dijatuhi hukum hudud. Wanita yang kafir harbi dalam kasus tertentu statusnya sebagai tawanan atau budak, yang dalam kondisi tertentu dihalalkan untuk menyeturubuhnya.

10. Pasangannya Masih Hidup

Bila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan mayat wanita, maka perbuatan zina tidak dijatuhi hukum hudud. Sebab syarat jatuhnya hukum hudud itu adalah bahwa wanita yang dizinai adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang masih hidup atau bernyawa. Sedangkan menyetubuhi mayat memiliki hukum tersendiri.<sup>61</sup>

#### D. Kriteria perzinahan menurut KUHP

Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 24 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelami laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *Arrest Hooge Raad*, tanggal 5 februari 1912 (W. 9292).

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.

Selain itu, menurut pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum

<sup>61</sup> Ahmad Sarwat, *Op.cit*, h. 157



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dalam ketentuan pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan diluar pernikahan tersebut, memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya dan atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun.

Perempuan yang kondisinya seperti telah disebutkan, yaitu, dalam kondisi pingsan, tidak berdaya atau belum berumur lima belas tahun, yang disetubuhi di luar perkawinan oleh seorang laki-laki, maka KUHP, RUU-KUHP 2008, dan KUHP Belanda menemukan larangan yang sama, meskipun hukumannya berbeda.

Berdasarkan uraian sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat di masukkan sebagai perbuatan pidana adalah :

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun); atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk di kawini.<sup>62</sup>

#### E. Dampak Perbuatan Zina

##### 1. Merendahkan Derajat manusia.

Perilaku seks bebas (*free sex*) merendahkan derajat kemanusiaan itu sendiri. Karena perilaku seks bebas menyalurkan kebutuhan biologis seksualnya sama saja seperti hewan yang tidak punya aturan. Mereka bebas melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan pernikahan. Bila hewan butuh menyalurkan seksnya, maka siapa saja diantara lawan jenisnya, dapat melakukan hubungan seks. Manusia diciptakan punya akal sebagai kelebihan dari makhluk hewan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia dan sempurna.<sup>63</sup>

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Neng Djubaedah, *Op. Cit*, h. 65

<sup>63</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta, Sinar grafika Offset, 2007), h. 50, ke-1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan sesungguhnya kami telah memuliakan umat manusia, dengan memberi mereka saranatumpangan didaratan dan dilautan, memberikan mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebih utamakan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan sempurna. (QS. Al-Isra', 70)*

## 2. Hilangnya Kehormatan Wanita

Perilaku seks bebas merendahkan harga diri, martabat dan kesucian seorang perempuan. Padahal agama islam disatu sisi meletakkan derajat kaum perempuan (ibu) lebih tinggi dari pada kaum laki-laki (bapak).

Hadist nabi Muhammad SAW.:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ مَحَبَّتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari ['Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah] dari [Abu Zur'ah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." [Ibnu Syubrumah] dan [Yahya bin Ayyub] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Zur'ah] hadis seperti di atas."

Fitrah perempuan akan menolak siapapun yang hendak menodai kesuciannya. Sebab, perempuan yang pernah ternoda itu tidak ada harganya lagi dimata masyarakat, dan ia akan dibiarkan berkeliaran kesana kemari bagai kupu-kupu malam. Surga bagi perempuan adalah cinta, dan apabila perempuan kehilangan cinta maka kehilangan kebahagiaannya. Dan surge kita adalah perasaan kita, dan apabila kita kehilangan perasaan, maka hilanglah segala sesuatu. Begitu pula kebahagiaan yang didambakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh setiap orang. Karena pada hakikatnya ia takka bias diperoleh dengan perbuatan nista dan hina.<sup>64</sup>

### 3. Anak lahir Tanpa Ayah

Kelahiran anak tanpa ayah, adalah konsekuensi dari hubungan seks bebas. Betapapun hati-hatinya setiap pelaku seks bebas menggunakan alat-alat kontrasepsi, kondom misalnya, untuk mencegah kehamilan, toh dari sekian banyak dan berulang-ulangnya seks bebas, bisa juga kebobolan. Pelakunya (perempuan) hamil. Kondom yang dipakai bisa bocor.<sup>65</sup>

Anak yang lahir diluar pernikahan, hasil seks bebas, ditengah masyarakat pasti menghadapi masalah. Perasaan mender, rendah diri, aib tercoreng dimuka sejak mereka lahir ulah perbuatan “orang tuanya”. Ia akan merasa kesulitan didalam menempuh bahtera kehidupan, jalan yang ditempuh bakal penuh dengan rintangan-rintangan. Kecuali bagi mereka yang berpandangan luas, masalah ini dapat diatasi. Orang-orang ini menyadari seharusnya anak yang lahir dari hubungan seks bebas itu tidak dibawa-bawa dengan kesalahan yang diperbuat oleh kedua orang tua.<sup>66</sup>

### 4. Aborsi

Pengguguran kandungan, aborsi adalah akibat yang paling menyedihkan dari perbuatan seks bebas. Banyak wanita yang melakukan seks bebas terpaksa melakukan aborsi karena tidak ingin bayi yang

<sup>64</sup> Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa-Dosa Menurut Al-qur'an*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), , Cet. Ke-4, h. 110

<sup>65</sup> Armaidi Tanjung, *Op.cit*, h.57

<sup>66</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikandungnya lahir. Tindakan aborsi selain melibatkan perempuan, juga melibatkan pihak rumah sakit, dokter (ahli kandungan), dukun dan tenaga medis lain. Karena keadaan aborsi sudah begitu biasa dan umum langsung dalam masyarakat, sampai-sampai kantor berita *Reuters* (sebagaimana dikutip *Tempo*) menyebutkan, bahwa rumah sakit, dokter dan dukun berlomba-lomba melakukan aborsi kriminal.<sup>67</sup>

Dalam aturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia juga melarang aborsi. Ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam beberapa pasal. Pasal 299 berbunyi, barangsiapa dengan sengaja mengobati seseorang perempuan atau seseorang menyuruh seseorang supaya perempuan itu diobati, dengan memberitahukan atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.<sup>68</sup>

Pasal 346 berbunyi, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 347 ayat (1) berbunyi, barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Ayat (2) berbunyi, jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 61

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 348 ayat (1) berbunyi, barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Ayat (2) berbunyi, jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

Pasal 349 berbunyi, jika seorang dokter, bidan atau tukang obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346 atau bersalah melakukan atau membantu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dapat ditambah sepertiganya dan boleh dicabut haknya menjalankan pekerjaannya dalam mana ia melakukan kejahatan itu.<sup>69</sup>

#### F. Kriteria perzinahan menurut KUHP

Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinahan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.<sup>70</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Ibid, h. 73

<sup>70</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), h. 209

<sup>71</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### G Kriteria Tindak Pidana Perzinahan

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.<sup>72</sup>

Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.<sup>73</sup> Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah.

Diapun tidak harus tunduk pada pasal 27 BW.<sup>37</sup> Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada pasal 27 BW. Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perzinahan tersebut sedang terikat perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perzinahan, meskipun bukan

<sup>72</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, h. 387

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina.<sup>74</sup>

Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjatuhnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijera pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.<sup>75</sup>

Selanjutnya, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu. Dalam hal perzinaan, pengaduan tidak dapat diajukan terhadap penyerta saja. Tetapi hendaklah kedua pelaku dilaporkan.

<sup>74</sup> Syamsul Huda, *Op.cit*, h. 388

<sup>75</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu. Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas *opportunitas*.<sup>76</sup>

Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidaksetujuan”. Jika telah dianggap ada “persetujuan” maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut.<sup>41</sup> Sehingga jika terjadi perzinaan sedangkan isteri atau suami pelaku setuju akan tindakan perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan. Ini karena suami atau isteri pelaku telah setuju.<sup>77</sup>

Namun demikian, dalam hal pengadun semacam ini, pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampun. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu telah meninggal dunia. Dan pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan.

Pada kasus perzinaan, pengaduan dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam prakteknya, sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 389

<sup>77</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu, bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.<sup>78</sup>

### H. Jenis Zina dan Hukuman tindak pidana perzinahan.

Dalam hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam zina.

#### 1. Jenis Zina

Para ulama membagi pelaku zina menjadi dua macam, yaitu :

##### a. Ghairu Muhsan

Orang yang berzina, namun belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri (*jima'*) lewat pernikahan yang sah dan syar'I disebut *ghairu muhsan* (.....).

##### b. Muhsan

Orang yang berzina, dan dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri (*jima'*) lewat pernikahan yang sah dan syar'I, disebut zina *ghairu muhsan*.

#### 2. Hukuman Buat Pezina :

Hukuman buat pezina terbagi dua macam sesuai dengan pelakunya, apakah muhsan atau ghairu muhsan.

##### a. Hukuman Zina Ghairu Muhsan

<sup>78</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, h. 89



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman zina ghairu muhsan adalah jalad atau cambuk dan diasingkan selama setahun. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

Artinya: Wanita dan laki-laki yang berzina maka cambuklah masing-masing mereka seratus kali. (QS.An-Nur:2)

Selebihnya yaitu tentang mengasingkan mereka selama setahun, para ulama sedikit berbeda pandangan : Al-Hanafiyah berpendapat bahwa seorang muhsan cukup dicambuk seratus kali saja tanpa harus diasingkan selama setahun. Dalil yang mereka gunakan adalah zahir ayat yang secara terang hanya menyebutkan cambuk saja tanpa menyebutkan pengasingan.

Dan bila ditambah dengan cambuk, maka menjadi penambahan atas nash dan penambahan itu menjadi nasakh. Jadi masalah mengasingkan bagi Al-Hanafiyah bukan termasuk hudud, tetapi dikembalikan kepada hakim sebagai bentuk hukuman ta'zir. Bila hakim memandang ada maslahatnya maka bias dilakukan dan bila tidak maka tidak perlu dilakukan.

Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpandangan bahwa mengasingkan pezina selama setahun adalah bagian dari hudud dan harus digabungkan dengan pencambukan. Pengasingan itu sendiri ditentukan bahwa jaraknya minimal jarak yang membolehkan seseorang mengqashar sholatnya. Dalil yang mereka gunakan untuk mengasingkan ini adalah sabda Rasulullah SAW :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَن بِجِلْدٍ مِائَةً، وَتَعْرِيبٍ عَامٍ

Artinya: *Nabi SAW memerintahkan hukuman buat pezina bukan muhsan : di cambuk seratus kali dan diasingkan setahun.*  
(HR. Bukhari)

Namun mereka mengatakan bahwa pengasingan ini hanya berlaku bagi laki-laki saja, sedangkan wanita yang berzina tidak perlu diasingkan kecuali ada mahram yang menemaninya seperti suami atau mahram dari keluarga. Karena Rasulullah SAW melarang bepergiannya seorang wanita, wanita tidak boleh bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama suami atau mahramnya.

Al-Malikiyah berkata bahwa laki-laki diasingkan ke negeri yang asing baginya selama setahun. Sedangkan wanita tidak diasingkan karena takut terjadinya zina untuk kedua kalinya sebab pengasingan itu.

#### b. Hukum Zina Muhshan

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaku zina muhsan dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW secara umum :

Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat tiga kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah.

Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda :





وَاعْذُ يَا أُتَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا

Artinya : *Wahai Unais, datangilah wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah. (HR. Bukhari)*

Kisah Maiz diriwayatkan dari banyak alur hadits dimana Maiz pernah mengaku berzina dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya? Kisah seorang wanita Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah SAW mengaku berzina dan telah hamil, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melahirkan dan merawat dulu anaknya itu hingga bias makan sendir dan barulah dirajam.

Zina muhsan adalah puncak perbuatan keji sehingga akal manusia pun bias menilai kebusukan perbuatan ini, karena itu hukumannya adalah hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati dengan rajam.<sup>79</sup>

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Op.cit*, h. 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perbuatan zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang mana perbuatan zina menurut KUHP:
  - a. Dapat dikenakan pada orang yang telah melakukan akad nikah dan masih berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangan sahnya pada saat melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sahnya yang dikategorikan zina tersebut.
  - b. Tidak dapat dikenakan pada orang yang pernah melakukan akad nikah, tetapi pada saat terjadinya hubungan seksual yang dikategorikan zina itu, ia tidak berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangan sahnya, atau berada dalam posisi janda atau duda.
  - c. Tidak dapat dikenakan pada orang yang belum pernah menikah (jejak atau perawan)
2. Zina dalam KUHP tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun poin-poinnya sebagai berikut:
  - a. Dari segi defenisi zina, sangat tampak perbedaan yang bertentangan antara KUHP dan hukum Islam. KUHP membatasi atau memberi syarat tentang defenisi zina yang mana pembatasan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam hukum Islam yang diharamkan bukan hanya sebatas melakukan perbuatan zina, akan tetapi Islam juga mengharamkan segala hal yang mendorong untuk melakukannya, dan segala penyebab yang dapat membuat orang melakukannya. Maka dapat kita lihat bahwa dalam pasal 284 terkesan melonggarkan dan memberi peluang besar untuk orang berbuat zina.
- c. Dalam KUHP status suami istri menjadi syarat agar perbuatan tersebut masuk kategori zina. Sedangkan dalam hukum Islam perbuatan zina tidak terbatas oleh status suami istri, intinya perbuatan tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam status suami istri menjadi pembeda dalam pemberian hukuman zina, bukan sebagai syarat perbuatan zina sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 284 KUHP.

#### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah segera mengganti dan menghapus KUHP terutama dalam masalah perzinaan. Karena aturan perzinaan dalam KUHP tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat budaya yang hidup di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah dan seluruh masyarakat agar mempelajari dan memberikan edukasi tentang bahaya zina. Karena perbuatan ini salah satu penghambat kemajuan suatu Negara karena hilangnya rasa malu dan rusaknya moral.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, Jil. 6,
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Ahsan Aksan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jil. 16,
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Februari 2006
- Ahmad Sarwat, , *Seri Fiqih Kehidupan jinayat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019),
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa-Dosa Menurut Al-qur'an*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), Cet. Ke-4,
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-2
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008),
- A Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 1,
- Amaldi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta, Sinar grafika Offset, 2007), Cet, ke-1
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9, h.167
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press. 2008),
- Harri Sasangka, Ahmad Rifa'i, *KUHP Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), Cet. Ke-1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ham Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Rijal Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, Jil. 10
- Hidayat, *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 16 No.1 Tahun 2016
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982),
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. Ke-9, Jil. 9
- Neng Zubaidah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), Cet. 1,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996),
- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)
- Sahran Hadziq, *Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji Dalam Perspektif Living Law*, Jurnal Lex Renaissance Vol. 4 Januari 2014
- Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-1,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1973), Jil. 2
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990),
- Syaiful Bakri, *Sejarah Pembaruan KUHP&KUHP*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), Cet. Ke-1
- Samsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), Cet. 2, Jil. 6,
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jil. 8, Cet. Ke-1
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981), Cet. Ke-3,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Tim Penerbit Jabal, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), Cet. Ke-2

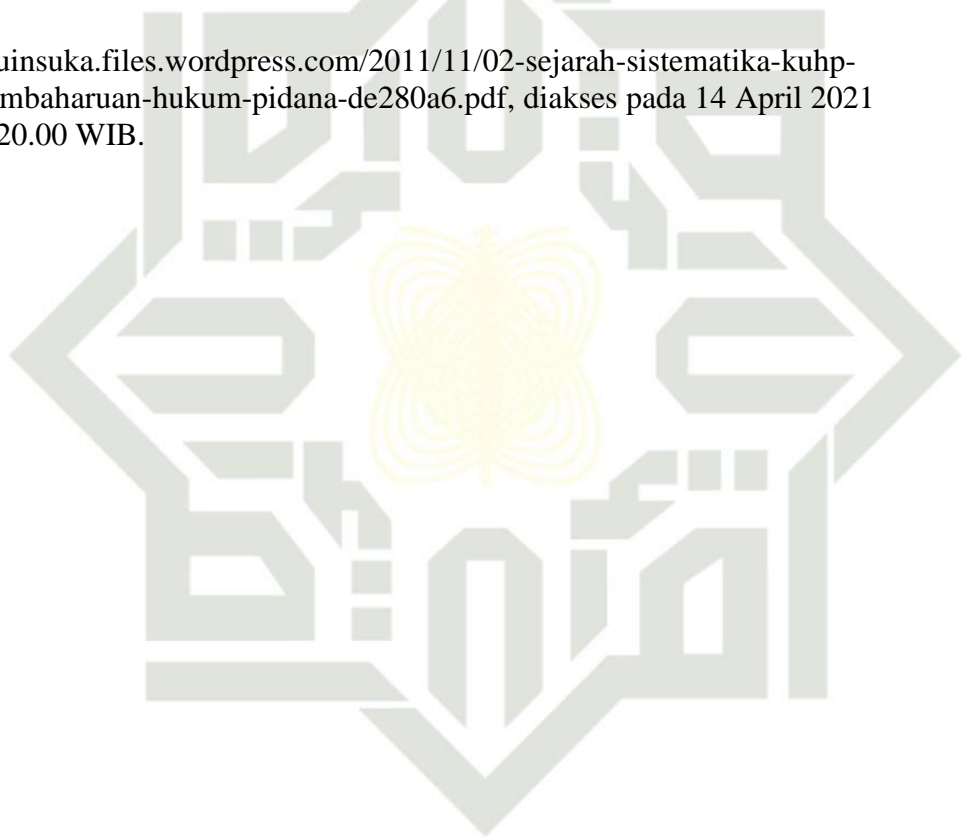
Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prapanca, 1962),

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, (Surabaya: Dar Al-Abidin, t.th),

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

<https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada hari Sabtu 09 Januari 2021, pukul 15.30 WIB.

<https://himaihuinsuka.files.wordpress.com/2011/11/02-sejarah-sistematika-kuhp-dan-pembaharuan-hukum-pidana-de280a6.pdf>, diakses pada 14 April 2021 Pukul 20.00 WIB.



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“ZINA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PASAL 284 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)”** yang ditulis oleh :

Nama : Kamaluddin tamusai Nst  
NIM : 11421100755  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir ,Lc.,MA**

Sekretaris

**Yuni Harlina, M.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : KAMALUDDIN TAMUSAI NST**  
**NIM : 11421100755**  
**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**  
**JUDUL : ZINA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PASAL 284 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)**

**Pembimbing: Dr. Wahidin., M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**



## RIWAYAT PENULIS

Ha



Nama lengkap Kamaluddin Tamusai Nst, lahir pada tanggal 10 Mei 1996 di ujung padang kecamatan Aek Natas kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara, Ayah Sangkot Nasution dan Ibu Rasidah Hasibuan. Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh sebagai berikut, Sekolah

Dasar Negeri 115486 desa ujung padang, lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di PKU (Pendidikan Kader Ulama) Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran, pada tingkat ini penulis aktif di organisasi OPDU (Organisasi Pelajar Daar Al Uluum) sebagai waka dakwah dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum melalui jalur SPAN-PTKIN.

Dalam masa perkuliahan penulis melakukan Magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor KUA Senapelan pada tahun 2016, dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu pada Agustus 2017. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap isi KUHP pasal 284. Alhamdulillah atas anugerah dan hidayah Allah SWT pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis Munaqasyah dalam ujian sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga dengan judul: "Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)" dan dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar (SH) di bawah bimbingan Bpk. Dr. Wahidin, M.Ag Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

1. Ha  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.